

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website*. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya indeks SPBE	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.	- Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
		Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	- Perlu peningkatan pembangunan / penyediaan fiber optic dalam rangka

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.</p> <p>- Kurangnya layanan kapasitas bandwidth dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan</p> <p>- Kurangnya sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan</p>
2	Masih rendahnya indeks Keamanan Informasi	Pemenuhan variabel keamanan informasi masih belum optimal	<p>- Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi</p> <p>- Masih kurangnya tata kelola keamanan informasi</p> <p>- Terbatasnya tenaga teknis untuk pengamanan informasi</p>
3	Belum terbukanya badan publik	Masih rendahnya nilai pemeringkatan badan publik	<p>- Belum terbukanya badan publik pada OPD</p> <p>- Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik</p> <p>- Masih kurangnya SDM untuk mengoperasikan web PPID</p>
4	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS)	<p>- Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan</p> <p>- Belum adanya regulasi (baru ada Perpres satu data)</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Masih rendahnya standarisasi LPSE	Masih rendahnya standarisasi LPSE	- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung keamanan infrastruktur TIK dan informasi LPSE
			- Belum dilakukan penilaian kembali oleh LKPP karena kurangnya sarana dan prasarana
			- Ketersediaan anggaran yang terbatas
6	Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan belum optimal	- Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis SDM
		Terbatasnya sarana dan prasarana	- Keterbatasan alokasi anggaran

### 3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”**. Dalam rangka penjabaran misi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi pertama yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat”.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program, Dinas Komunikasi dan Informatika tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
<b>Visi :</b> Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan	<b>Tugas Perangkat Daerah :</b> Membantu Bupati menyelenggarakan -an Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan	Masih rendahnya indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya tata kelola dan ekosistem <i>eGovernment</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan indeks SPBE</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
Berakhlak Mulia  <b>Misi 1 :</b> Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat	informatika, persandian dan statistik  <b>Fungsi :</b> a. Penetapan rencana kerja; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik c. Penyelesaian urusan pemerintahan dan pelayanan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik e. Pembinaan pengelolaan urusan ke	Masih rendahnya indeks Keamanan Informasi	tata kelola pemerintahan  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi</li> <li>• Masih kurangnya tata kelola keamanan informasi</li> <li>• Terbatasnya tenaga teknis untuk pengamanan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam pemenuhan indeks keamanan informasi</li> </ul>
		Belum terbukanya badan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terbukanya badan publik pada OPD</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik</li> <li>• Masih kurangnya SDM untuk mengoperasikan web PPID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam peningkatan keterbukaan informasi publik</li> <li>• Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD</li> </ul>
		Masih rendahnya pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman OPD terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen para pengambi</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
	sekretariat / ketatausahaan Dinas; g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas	tan data statistik sektoral	pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan • Belum adanya regulasi (baru ada Perpres satu data)	l kebijakan dalam pemanfaatan data statistik sektoral • Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD
		Masih rendahnya standarisasi LPSE	• Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung keamanan infrastruktur TIK dan informasi LPSE - Belum dilakukan penilaian kembali oleh LKPP karena kurangnya sarana dan prasarana • Ketersediaan anggaran yang terbatas	• Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam meningkatkan standarisasi LPSE • Adanya inovasi dan kreatifitas para aparatur dalam pelaksanaan tugas

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Provinsi**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015 – 2019**

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu

kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu: A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 untuk mendukung Visi Gubernur “Terwujudnya Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi “. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan untuk sebagai berikut :

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023**

N O	VISI/MISI / PROGRAM KDH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAH AN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1	Visi : Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”  Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah	1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.	1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal. 3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal. Ketersediaan data sektoral belum optimal.	Penghambat: a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; b. Koordinasi internal belum optimal; c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai Pendorong:

NO	VISI/MISI / PROGRAM KDH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
	Kabupaten / Kota  Program Unggulan 3 : Reformasi birokrasi di Kabupaten / Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan system layanan terintegrasi	2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan EGovernment, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.  3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas	4. Pemanfaatan data sektoral belum optimal. 5. Keterbukaan badan public belum optimal. 6. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;</li> <li>- Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi public utama Jawa Tengah;</li> <li>- Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;</li> <li>- Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggara</li> </ul>

<b>N O</b>	<b>VISI/MISI / PROGRAM KDH</b>	<b>TUPOKSI DISKOMINFO</b>	<b>PERMASALAH AN</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG</b>
				raan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### **3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 di bawah ini akan diuraikan faktor –faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS disajikan dalam tabel 3.4 :

**Tabel 3.4**  
**Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD**

<b>No</b>	<b>Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1.	Rencana Pembangunan Gedung TIK	Belum adanya Gedung TIK yang meliputi gedung tempat kerja dan Gedung data centre yang memadai	DED belum seluruhnya tersusun, baru DED Gedung TIK sedangkan Gedung Tempat Kerja belum tersusun. Akan disusun	Penguatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah

			pada perubahan APBD Tahun 2019	
--	--	--	---	--

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis untuk Dinas Kominfo pada periode 2019 - 2024, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Meningkatkan Keamanan Informasi.
- 3) Meningkatkan kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- 4) Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral.
- 5) Meningkatkan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).